



STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA TASIKMALAYA DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA DI KOTA TASIKMALAYA

Hj. Genis Arivanny Putri Sekarsari, M.I.P
Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Tasikmalaya

genisarivanny@gmail.com

Abstrak

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan *purposive* sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Tasikmalaya sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Strategi yang dijalankan nya sudah berjalan dengan optimal di beberapa tahun terakhir ini. Salah satu contoh strategi BNN Kota Tasikmalaya dalam menanggulangi peredaran narkoba ialah desa bersinar atau desa bersih narkoba, ini sudah ada di beberapa wilayah kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Kata kunci: Penanggulangan narkoba, Badan Narkotika Nasional, Strategi BNN Kota Tasikmalaya.

1. Pendahuluan

Pada tahun 2021 BNN menyelesaikan 83 kasus, lalu pada tahun 2022 angka penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya ini menurun menjadi 69 kasus, tetapi ditahun berikutnya kembali melonjak di angka 87 kasus ini adalah angka terbesar dari beberapa tahun terakhir, kemudian pada tahun 2024 tercatat kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya ini mencapai 85 kasus.

Mengingat remaja adalah pemegang tongkat estafet masa depan Indonesia, maraknya kasus narkoba di kelompok usia ini menjadi peringatan keras. Upaya pemberantasan narkoba tidak bisa lagi dilakukan dengan cara biasa; diperlukan tindakan yang jauh lebih agresif dan masif untuk melindungi aset bangsa tersebut. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang serius, hal ini akan menjadi bahaya besar bagi kelangsungan negara. Tingginya angka kasus ini tentu tidak berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor pendorong.

Termasuk di Kota Tasikmalaya penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya meningkat pada setiap tahun. Upaya-upaya yang telah BNN Kota Tasikmalaya lakukan belum cukup untuk menghentikan peredaran narkoba di Kota Tasikmalaya yang semakin meluas. Dari hasil pendataan oleh BNN Kota Tasikmalaya pengguna narkoba ini banyak digunakan oleh kalangan pelajar dan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.

Fenomena yang terjadi dalam kasus peredaran narkoba di Kota Tasikmalaya ini adalah pengguna dan peredaran atau pengedar yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Angka dari setiap tahun masih sama banyaknya. Menurut grafik data ungkap kasus narkoba milik BNN Kota Tasikmalaya meskipun sempat turun pada tahun 2022 namun angka ini kembali naik pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, Kota Tasikmalaya masuk 10 kota di Jawa Barat dengan pengguna narkoba tertinggi. Bahkan pada kasus terakhir BNN berhasil menutup pabrik pembuatan narkoba yang berada di daerah Tamansari, Cibeureum, Kota Tasikmalaya, yang ternyata sudah berjalan

selama 2 tahun. Minimnya sosialisasi menjadi salah satu faktor masyarakat banyak yang masih belum mengetahui efek dari penggunaan narkoba tersebut. Baik dampak negatif dari narkoba itu sendiri bagi pengguna dan bagi pengedar. Menurut hukum itu sendiri jika seseorang menggunakan narkoba dan menyerahkan diri ke BNN ia akan hanya direhabilitasi saja di pelayanan yang disediakan oleh BNN Kota Tasikmalaya. Namun jika kasusnya oleh BNN itu sendiri yang diselesaikan ini akan ada kasus hukum nya juga. Ketidaktahuan masyarakat akan hal ini, menjadikan takutnya melapor diri.

2. Metodologi

Menurut Yin (2012). studi kasus deskriptif akan digunakan dalam penelitian ini. Desain ini adalah metode untuk menggambarkan keadaan dan keadaan dari satu objek. Dengan kata lain, teknik ini menggambarkan keadaan keberadaan sekaligus mengklasifikasikan data. Ini menguntungkan dalam menemukan atau menjelaskan fenomena yang kurang dipahami dari perspektif gambaran besar Pendekatan ini menjadi metode yang tepat untuk pemeriksaan mendalam terhadap fenomena tertentu yang dapat menghasilkan analisis yang komprehensif. Ini akan dipilih sebagai desain penelitian ini, untuk mengeksplorasi strategi BNN dalam menanggulangi peredaran narkoba.

3. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Guna menekan laju penyalahgunaan narkoba, pemerintah mendirikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan landasan hukum Keputusan Presiden No. 35 Tahun 2009. BNN memiliki tanggung jawab krusial dalam membantu Presiden, yakni dengan mensinergikan seluruh instansi terkait dalam penyusunan kebijakan penanganan narkoba. Selain fungsi koordinasi, BNN juga bergerak secara operasional melaksanakan pencegahan dan pemberantasan dengan membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari elemen-elemen instansi pemerintah terkait.

Dalam hal ini BNN mempunyai beberapa tugas khusus, termasuk untuk BNN di Kota Tasikmalaya juga diantaranya adalah:

- a. Merumuskan serta merealisasikan kebijakan nasional terkait penanggulangan narkoba dan prekursornya
- b. Melakukan aksi nyata pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba
- c. Membangun sinergi dan koordinasi dengan Polri dalam upaya penegakan hukum narkotika
- d. Mengoptimalkan kualitas dan kapasitas layanan rehabilitasi medis maupun sosial, baik milik pemerintah maupun swasta
- e. Mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menangkal bahaya narkoba
- f. Melakukan supervisi dan pengarahan terhadap aktivitas warga dalam upaya pencegahan
- g. Mengembangkan fasilitas laboratorium khusus narkotika
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Menjalankan tata kelola administrasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus

- j. Menyusun laporan pertanggungjawaban tugas secara berkala setiap tahun.

BNN Kota Tasikmalaya ini memegang wilayah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Seharusnya organisasi ini ada di kota dan kabupaten namun, BNN kota Tasikmalaya ini masih memegang 2 wilayah sekaligus. Dengan dibantunya dengan pembentukan kelompok warga di kabupaten, ini sangat membantu BNN dalam menjalankan tugasnya, masyarakat ikut berpartisipasi dalam tugas ini yang tentunya kerjasama masyarakat menjadi hal penting untuk terlaksana nya tugas dari BNN Kota Tasikmalaya ini.

Angka kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terbilang cukup stabil. Meskipun masih terbilang di angka yang cukup tinggi di Jawa Barat, berdasarkan data yang ada di kantor BNN Kota Tasikmalaya Sejak tahun 2021 hingga 2024 terdapat 324 kasus penyalahgunaan narkoba. Permasalahan tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Tasikmalaya ini karena kondisi masyarakat yang belum banyak tereduksi oleh bahaya menjadi pengguna dan penyebar narkoba.

Terlihat dari tugas dan fungsi BNN Kota Tasikmalaya betapa besar dan kompleks tanggung jawabnya yang juga memegang 2 wilayah secara bersamaan. Dengan begitu anggota BNN dalam menjalankan tugasnya juga harus bisa secara optimal memfasilitasi tugas pokok dan fungsinya dengan baik dengan segala keterbatasan yang ada.

BNN Kota Tasikmalaya menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, seperti belum adanya dukungan lebih dari sarana dan prasarana yang lengkap, sumber daya manusia yang memadai dan anggaran yang dikelola sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari anggota BNN Kota Tasikmalaya terdapat beberapa permasalahan terkait tugas dan fungsi BNN Kota Tasikmalaya, antara lain:

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di BNN Kota Tasikmalaya belum optimal sehingga belum setiap daerah di Kota Tasikmalaya maupun Kabupaten Tasikmalaya terjamah oleh BNN Kota Tasikmalaya.
- b. Kurangnya SDM di BNN Kota Tasikmalaya sedikit menghambat pergerakan BNN Kota Tasikmalaya dalam menjalankan tugas pokok dari BNN itu sendiri.
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan BNN Kota Tasikmalaya kepada masyarakat.
- d. Masih lemahnya pembinaan/sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan faktor permasalahan lain terkait pelayanan tentang tugas dari BNN Kota Tasikmalaya, bisa dilihat dari beberapa perspektif:

1. Bidang Pemberantasan
 - a) Sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung

- b) Kerjasama masyarakat
 - c) Kurangnya SDM di BNN Kota Tasikmalaya
 - d) Lemahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba
2. Bidang P2M (Penanggulangan dan Pemberdayaan Masyarakat)
- a) Keterlibatan masyarakat yang masih kurang
 - b) Masyarakat masih beranggapan bahwa berurusan dengan narkoba masih hal yang tabu
 - c) Belum didukung oleh lembaga daerah
3. Bidang Rehabilitasi
- a) Kurangnya SDM
 - b) Sarana dan prasarana yang belum optimal untuk mendukung kegiatan kinerja unit.
 - c) Masyarakat ragu melaporkan tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan atau diketahui untuk berkomunikasi dengan BNN Kota Tasikmalaya

a. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi BNN Kota Tasikmalaya dalam Penanggulangan Narkoba di Kota Tasikmalaya.

a) Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor pendukung dalam strategi BNN Kota Tasikmalaya dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kota Tasikmalaya, antara lain:

1. Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi di beberapa aspek, contohnya di bidang pemberantasan.
2. Terbukanya pihak BNN Kota Tasikmalaya jika ada masyarakat yang ingin melapor diri atau melaporkan terkait hal apapun mengenai narkoba. Berdiskusi mengenai bahaya narkoba itu sendiripun pihak BNN terbuka untuk masyarakat.
3. Pelaksanaan yang terus berjalan meskipun dengan memperkecil skala wilayah namun tetap dilaksanakan dengan SDM yang ada.
4. Hubungan yang baik antara anggota BNN Kota Tasikmalaya dengan masyarakat sehingga berhasil membangun desa bersinar desa bersih narkoba di wilayah perbatasan dan juga di Kota Tasikmalaya.
5. Sosialisasi yang sudah mencakup di pendidikan, lembaga swasta dan juga masyarakat.

b) Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat dari strategi BNN dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kota Tasikmalaya, yaitu:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia adalah kunci utama dan faktor penentu dalam setiap proses pembangunan maupun keberhasilan organisasi. Aset fisik seperti modal finansial, kecanggihan teknologi, hingga kekayaan alam akan menjadi sia-sia tanpa adanya campur tangan manusia yang mampu

mengelolanya. Keunggulan SDM dibandingkan sumber daya lainnya terletak pada aspek rasio, rasa, keterampilan, dan daya cipta yang dimilikinya. Potensi inilah yang digunakan untuk mengembangkan lingkungan sekitar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, peran sentral SDM bertujuan untuk mendorong produktivitas sehingga organisasi mampu berkompetisi dan meraih target yang ditetapkan.

Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi. Termasuk pada BNN Kota Tasikmalaya ini dengan memegang 2 wilayah yaitu kota dan Kabupaten Tasikmalaya dengan sumber daya yang terbatas tidak memungkinkan bisa dalam 1 periode menjangkau 2 wilayah sekaligus. Penambahan sumber daya manusia inipun menjadi evaluasi dari pihak BNN itu sendiri. Pada bidang pemberantasan, rehabilitasi dan P2M sumber daya manusia menjadi penghambat juga dalam menjalankan kegiatan.

2) Kurangnya partisipasi dari masyarakat

Untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya dengan bersih narkoba itu sendiri, kita harus merangkul dan memerlukan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Baik di kalangan pendidikan, lembaga swasta maupun masyarakat. Dengan luasnya cakupan BNN Kota tasikmalaya ini, tidak bisa berjalan sendiri. Harus bekerjasama dan beriringan dengan masyarakat. Peran ganda antara pemerintah dan elemen masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan. Kolaborasi yang padu di antara keduanya adalah syarat mutlak, karena pemerintah tidak dapat bekerja sendirian untuk mencapai hasil optimal tanpa dukungan rakyat. Selain aspek keterlibatan, penerapan strategi pembangunan yang akurat juga sangat dibutuhkan demi mencapai efisiensi biaya dan efektivitas hasil. Strategi ini berfungsi sebagai panduan untuk memperjelas porsi tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga kinerja optimal dan sinergi dapat tercapai.

Karena peran masyarakat sangat penting dalam hal ini. Masih ada masyarakat yang acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar tentang pengedar atau pengguna narkoba. Padahal hal kecil informasi tersebut sangat berarti bagi BNN untuk menindaklanjuti penyalahgunaan tersebut. Masyarakat masih tabu akan penyalahgunaan narkoba. Sehingga pihak BNN pun harus tetap gencar dalam mensosialisasikan pada masyarakat luas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

3) Terbatasnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah salah satu hal yang penting untuk mendukung suatu kegiatan. Sarana dan prasarana yang memadai seperti alat, perlengkapan atau fasilitas mempermudah suatu kegiatan untuk berjalan sebagaimana mestinya. sarana diartikan sebagai “segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan”. Sedangkan prasarana adalah “segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya)”. Sedangkan sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, pihak BNN Kota Tasikmalaya kurang didukung dalam sarana dan prasarana. Sehingga kegiatan yang mungkin seharusnya bisa dilakukan dalam satu periode ini harus

dilakukan di periode selanjutnya. Dengan begitu ini sedikit menghambat pada berjalannya suatu kegiatan. Berbeda jika sarana dan prasarana nya mendukung seluruh kegiatan BNN akan berjalan secara optimal tanpa harus menekan beberapa kegiatan karena sarana dan prasarana yang kurang memadai.

4) Anggaran yang terbatas

Anggaran yang terbatas dapat menghambat kinerja organisasi karena menghambat perencanaan dan pengawasan, serta berisiko menimbulkan pemborosan. Pada kasus ini juga keterbatasan anggaran membuat pihak BNN Kota Tasikmalaya memperkecil kegiatan pada tiap periode. Karena anggaran untuk satu periode hanya cukup untuk beberapa daerah saja untuk BNN menjalankan tugasnya. Sedangkan BNN Kota Tasikmalaya membawahi 2 wilayah, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan 2 wilayah ini yang cukup luas dengan anggaran yang ada dan SDM yang belum memadai membuat pihak BNN memperkecil skala kegiatan untuk 2 wilayah ini. Karena pihak BNN itu sendiri belum bisa menjamah pada semua wilayah kota Tasikmalaya. Karena badan narkotika nasional itu adalah lembaga pemerintahan non-kementerian. Dimana pendapatan anggaran pun hanya dari pusat saja. Seperti bagaimana semestinya organisasi pemerintah yang tidak meraup biaya keuntungan, BNN ini adalah pemberi layanan bagi masyarakat secara gratis.

4.2 Pembahasan

a. Program

Program dalam sebuah lembaga adalah rencana kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Program ini disusun berdasarkan kesepakatan bersama anggota organisasi. Program merupakan manifestasi dari kumpulan kegiatan nyata yang disusun secara terpadu dan sistematis demi mencapai sasaran strategis. Sebagai turunan dari program, kegiatan berfungsi sebagai langkah operasional untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Dokumen ini kemudian didetailkan menjadi Rencana Kinerja tahunan yang disertai indikator keberhasilan. Siklus pengelolaan program sendiri mencakup tiga tahap vital: perencanaan, eksekusi, dan evaluasi.

Sementara itu, lembaga negara adalah badan pemerintahan pusat yang beroperasi berdasarkan mandat Undang-Undang untuk mencapai tujuan negara. Stabilitas kinerja anggota di dalamnya sangat penting untuk menjaga fungsi lembaga tersebut. Salah satu instrumen utamanya adalah program kerja, yakni agenda rutin yang disusun berdasarkan kesepakatan pengurus untuk periode tertentu. Karena setiap organisasi memiliki kebutuhan berbeda, penyusunan program kerja harus memperhatikan aspek analisis data, linimasa, pembagian tugas personel, serta evaluasi kelayakan dibandingkan program tahun lalu.

Pertanggung jawaban pada sebuah program kerja pada umumnya akan dibuat setiap akhir periode kepengurusan berupa format laporan yang ditujukan untuk semua anggota lembaga maupun organisasi tersebut. Ini berlaku pada semua jenis program kerja, termasuk contoh program kerja sederhana sekalipun.

b. Anggaran

Anggaran adalah rencana kerja terpadu yang dinyatakan dalam nilai keuangan untuk jangka waktu tertentu, meliputi seluruh spektrum kegiatan organisasi. Sebagai alat kontrol manajerial,

anggaran berfungsi memfasilitasi pencapaian tujuan dengan menyelaraskan perencanaan dan realisasi kinerja. Dokumen ini memetakan proyeksi sumber daya, pendapatan, dan belanja secara komprehensif. Seringkali dianggap sepele sebagai formalitas administratif, penyusunan anggaran sejatinya merupakan proses krusial yang membutuhkan analisis mendalam. Urgensi anggaran kian meningkat seiring pertumbuhan skala organisasi; ketika aktivitas operasional semakin kompleks, diperlukan perencanaan anggaran yang cermat untuk menyinkronkan divisi produksi, pemasaran, dan lainnya dalam satu rencana yang harmonis.

c. Prosedur/Standar Operating Procedure (SOP)

Merupakan dokumen kesepakatan yang memuat aturan dan spesifikasi teknis untuk menjamin setiap pekerjaan terlaksana sesuai standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Dokumen ini hadir untuk menertibkan alur kerja; jika prosesnya sederhana dan hanya satu bagian, cukup menggunakan Instruksi Kerja (IK), namun jika melibatkan banyak bagian, SOP mutlak diperlukan. Tanpa SOP yang baku, hasil kerja akan sangat bergantung pada persepsi subjektif setiap karyawan, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan kesalahan. Selain meningkatkan produktivitas dan menekan biaya, SOP juga krusial bagi perusahaan yang sedang tumbuh. Ketika skala bisnis membesar dan pimpinan tidak bisa lagi mengawasi setiap keputusan, SOP menjadi landasan sistematis untuk mengontrol operasional, mengomunikasikan perubahan, dan menjadi acuan evaluasi kinerja demi menjaga keberlangsungan bisnis.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Strategi BNN Kota Tasikmalaya dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kota Tasikmalaya, dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi dan Pelaksanaan strategi BNN Kota Tasikmalaya sudah terlaksana dengan optimal sesuai dengan *standar operasional procedure* .
2. Program kerja baik program kerja inti sesuai dengan UU no 35 tahun 2009 maupun program strategi yang BNN Kota Tasikmalaya buat sudah berjalan dengan baik
3. Beberapa strategi yang dilakukan BNN Kota Tasikmalaya ini antara lain mewujudkan desa bersinar (desa bersih narkoba), IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat), sosialisasi di keramaian seperti kegiatan *car free day* dan di beberapa wilayah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun faktor-faktor pendukung dari strategi BNN Kota Tasikmalaya ini dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kota Tasikmalaya, antara lain:

1. Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi di beberapa aspek, contohnya di bidang pemberantasan.
2. Terbukanya pihak BNN Kota Tasikmalaya jika ada masyarakat yang ingin melapor diri atau melaporkan terkait hal apapun mengenai narkotika. Berdiskusi mengenai bahaya narkoba itu sendiripun pihak BNN terbuka untuk masyarakat.
3. Pelaksanaan yang terus berjalan meskipun dengan memperkecil skala wilayah namun tetap dilaksanakan dengan SDM yang ada.
4. Hubungan yang baik antara anggota BNN Kota Tasikmalaya dengan masyarakat sehingga berhasil membangun desa bersinar desa bersih narkoba di wilayah perbatasan dan juga di Kota Tasikmalaya.
5. Sosialisasi yang sudah mencakup di pendidikan, lembaga swasta dan juga masyarakat

Daftar Pustaka

- F. Dian Wahyu, and P. -. Astuti, "Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 11, no. 2, pp. 475-486, Apr. 2022.
- I Made Karnadi, Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2021). Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 114-118. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2803.114-118>
- Jefri Sidik, & Geovani Meiwanda. (2022). Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(4), 53–59. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i4.639>
- Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Peralihan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. 4(3). 311-315. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.311-315>
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>